



WALIKOTA PARIAMAN,  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Politik.
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
dan  
WALIKOTA PARIAMAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RANCANGAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara.
3. Walikota adalah kepala kota madya, kepala wilayah kota administrative.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu bentuk penyusunan anggaran rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 616.934.202.345,00 (*Enam ratus enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.502.438.431,00 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.990.000.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.409.428.276,00 (Dua puluh milyar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.986.510.155,00 (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.116.500.000,00 (Sembilan milyar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar 10.990.000.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel Rp. 100.000.000,00 Seratus juta rupiah
  - b. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 1.500.000.000,00 Satu milyar lima ratus juta rupiah
  - c. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana Rp. 20.000.000,00 Dua puluh juta rupiah
  - d. Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron Rp. 110.000.000,00 Seratus sepuluh juta rupiah

	Pajak Penerangan Jalan Sumber		Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah
e.	Lain	Rp. 3.980.000.000,00	
f.	Pajak Parkir	Rp. 30.000.000,00	Tiga puluh juta rupiah
	Pajak Mineral bukan Logam dan		Tiga ratus lima puluh juta rupiah
g.	Batuan Lainnya	Rp. 350.000.000,00	
	PBBP2	Rp. 2.200.000.000,00	Dua milyar dua ratus juta rupiah
	BPHTB-		Dua milyar tujuh ratus juta rupiah
i.	Pemindahan Hak	Rp. 2.700.000.000,00	

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.980.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah).
- (10) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.409.428.276,00 (Dua puluh milyar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu



dua ratus tujuh puluh enam rupiah)., yang terdiri atas:

- |                                 |                       |   |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| a. retribusi jasa umum          | Rp. 15.253.847.276,00 | Lima belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah |
| b. retribusi jasa usaha         | Rp. 4.700.581.000,00  | Empat milyar tujuh ratus juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah   |
| c. retribusi perizinan tertentu | Rp. 455.000.000,00    | Empat ratus lima puluh lima juta rupiah   |

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.253.847.276,00 (Lima belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| a. retribusi pelayanan kesehatan                               | Rp. 6.250.000.000,00 | Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah  |
| b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan                  | Rp. 650.000.000,00   | Enam ratus lima puluh juta rupiah   |
| c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum               | Rp. 750.000.000,00   | Tujuh ratus lima puluh juta rupiah  |
| d. retribusi pelayanan pasar                                   | Rp. 461.847.276,00   | Empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah |
| e. retribusi pengujian kendaraan bermotor                      | Rp. 150.000.000,00   | Seratus lima puluh juta rupiah  |
| f. retribusi pengolahan limbah cair                            | Rp. 6.777.000.000,00 | Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah   |
| g. retribusi pelayanan tera / tera ulang                       | Rp. 15.000.000,00    | Lima belas juta rupiah  |
| g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi | Rp. 200.000.000,00   | Dua ratus juta rupiah   |

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.700.581.000,00 (Empat milyar tujuh ratus juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- |                        |                    |   |
|------------------------|--------------------|---|
| a. retribusi pemakaian | Rp. 375.581.000,00 | Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh |
|------------------------|--------------------|---|

	kekayaan daerah		satu ribu rupiah
b.	retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	Rp. 1.000.000.000,00	Satu milyar rupiah
c.	retribusi terminal	Rp. 400.000.000,00	Empat ratus juta rupiah
d.	retribusi tempat khusus parkir	Rp. 350.000.000,00	Tiga ratus lima puluh juta rupiah
e.	retribusi rumah potong hewan	Rp. 50.000.000,00	Lima puluh juta rupiah
f.	retribusi tempat rekreasi dan olahraga	Rp. 2.300.000.000,00	Dua milyar tiga ratus juta rupiah
g.	retribusi penjualan produksi usaha daerah	Rp. 225.000.000,00	Dua ratus dua puluh lima juta rupiah

(4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 455.000.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah)

a.	retribusi persetujuan bangunan gedung	Rp. 450.000.000,00	Empat ratus lima puluh juta rupiah
b.	retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	Rp. 5.000.000,00	Lima juta rupiah

#### Pasal 7

(1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.986.510.155,00 (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah ) yang terdiri atas :

bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN	Rp. 6.986.510.155,00	Enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah
---	----------------------	---

(2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.116.500.000,00 (Sembilan milyar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas;

a.	hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	Rp. 30.000.000,00	Tiga puluh juta rupiah
b.	jasa giro	Rp. 2.320.000.000,00	Dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah
c.	pendapatan bunga	Rp. 6.420.000.000,00	Enam milyar empat ratus dua puluh juta rupiah
d.	penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah	Rp. 250.000.000,00	Dua ratus lima puluh juta rupiah
e.	pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	Rp. 71.500.000,00	Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah
f.	pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah	Rp. 25.000.000,00	Dua puluh lima juta rupiah

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 646.934.202.345,00 (Enam ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 469.942.594.926,00 (Empat ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 287.033.872.523,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 176.438.724.074,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.382.478.329,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.087.520.000,00 (Dua milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 287.033.872.523,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN.
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN.
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD.
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH.
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.522.435.773,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.701.555.901,00 (Lima puluh satu milyar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.947.535.000,00 (Empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.702.966.613,00 (Enam milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 187.538.810,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 474.890.426,00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 178.522.435.773,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN
  - f. belanja tunjangan beras ASN
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
  - h. belanja pembulatan gaji ASN
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 126.642.276.123,00 (Seratus dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh

enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp. 12.858.759.439,00 (Dua belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp. 4.998.355.877,00 (Empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp. 8.198.805.380,00 (Delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp. 2.802.562.171,00 (Dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp. 8.143.210.306,00 (Delapan milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus enam rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp. 506.331.170,00 (Lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp. 2.505.207,00 (Dua juta lima ratus lima ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp. 11.650.000.000,00 (Sebelas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan sebesar Rp. 493.464.320,00 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 176.438.724.074,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang
  - b. belanja jasa
  - c. belanja pemeliharaan

- d. belanja perjalanan dinas
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
  - f. belanja hibah
  - g. belanja bantuan sosial
- (2) Anggaran belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.234.452.169,00 (Empat puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (3) Anggaran belanja Jasa sebesar Rp. 83.107.597.480,00 (Delapan puluh tiga milyar seratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - (4) Anggaran belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 10.477.078.460,00 (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
  - (5) Anggaran belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 17.405.369.000,00 (Tujuh belas milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
  - (6) Anggaran belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 9.256.323.965,00 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
  - (7) Anggaran belanja Hibah sebesar Rp. 4.382.478.329,00 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (8) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.287.520.000,00 Dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.620.748.060,00 (Delapan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah
  - b. belanja modal peralatan dan mesin
  - c. belanja modal gedung dan bangunan

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  - e. belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Anggaran Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah)
  - (3) Anggaran Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.283.572.853,00 (Sebelas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (4) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 28.766.335.117,00 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).
  - (5) Anggaran Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 45.222.793.090,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp. 348.047.000,00 (Tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.870.859.359,00 (Delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - (1) belanja bagi hasil
  - (2) belanja bantuan keuangan
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.138.442.830,00 (Tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus



tiga puluh rupiah).

- (3) Anggaran Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 83.732.416.529,00 (Delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah):

#### Pasal 19

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (30.000.000.000,00) (Tiga puluh milyar rupiah).

#### Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

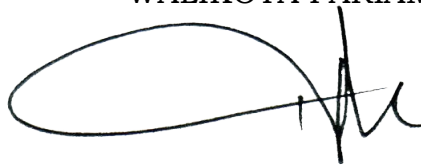
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes and a final flourish.

GENIUS UMAR

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>47.502.438.431</b>
4.1.01	Pajak Daerah	10.990.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	100.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	100.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	100.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	110.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	110.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	110.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.980.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.980.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.980.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	30.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	30.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	30.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.200.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.200.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.200.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.700.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.700.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.700.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.409.428.276
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.253.847.276
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.250.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.250.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	650.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	650.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	461.847.276
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	461.847.276
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	6.777.000.000
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	6.777.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	15.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.700.581.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	375.581.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	39.160.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	86.421.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	185.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	65.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.000.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.000.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	400.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	400.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	350.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	350.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	50.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.300.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.300.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	225.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	225.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	455.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.986.510.155
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.986.510.155

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.986.510.155
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.986.510.155
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.116.500.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	30.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	30.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.320.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.320.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.320.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6.420.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.420.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.420.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	250.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	250.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	250.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>563.520.763.914</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	536.740.853.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	488.282.802.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.658.809.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.220.682.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.294.272.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	611.935.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	484.560.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	128.534.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	382.767.313.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	382.767.313.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.300.667.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	296.888.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.929.150.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.060.586.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.310.797.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	463.859.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	703.101.000
4.2.01.01.03.0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	1.500.053.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	150.000.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	3.391.821.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.439.933.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.264.994.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.789.485.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	58.556.013.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	13.786.800.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	440.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.204.571.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	465.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.762.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	363.400.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.915.635.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	69.223.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.632.877.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	718.434.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	345.997.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	588.400.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	8.914.775.000
4.2.01.02.01	DID	8.914.775.000
4.2.01.02.01.0001	DID	8.914.775.000
4.2.01.05	Dana Desa	39.543.276.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	39.543.276.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	39.543.276.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.779.910.914

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	26.779.910.914
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.779.910.914
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.779.910.914
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.911.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.500.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.500.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.500.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.411.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.411.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.411.000.000
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	3.411.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>616.934.202.345</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>469.942.594.926</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	287.033.872.523
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	178.522.435.773
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	126.642.276.123
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	124.655.959.635
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.986.316.488
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.858.759.439
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.648.371.491
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	210.387.948
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.998.355.877
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.998.355.877
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.198.805.380
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.935.122.590
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	263.682.790
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.802.562.171
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.680.246.075
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	122.316.096
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.143.210.306
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.996.848.383
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	146.361.923
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	506.331.170
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	491.001.030



Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	15.330.140
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.505.207
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.396.684
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	108.523
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	11.650.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	11.650.000.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	493.464.320
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	350.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	143.464.320
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	850.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	850.000.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.376.165.780
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.367.834.385
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	8.331.395
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	51.701.555.901
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	50.399.840.815
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.727.840.815
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	672.000.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	545.715.086
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	545.715.086
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	216.000.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	216.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	540.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	540.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.947.535.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	229.600.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	60.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	800.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.400.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	159.200.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.200.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	812.160.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	812.160.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.534.812.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	36.534.812.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	300.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	300.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	207.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	207.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.769.618.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.769.618.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.788.045.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.427.250.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	294.795.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	66.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	606.000.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	7.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	598.800.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.702.966.613
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.232.200
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.232.200
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.600.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.600.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	299.040.225
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	299.040.225
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	54.810.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	54.810.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.319.688
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	90.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	910.319.688
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.944.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.944.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.175.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.175.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	187.538.810
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	471.170
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	471.170
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	25.000.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	25.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	474.890.426
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	364.010.426
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	364.010.426
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	496.950.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	496.950.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	496.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.438.724.074
5.1.02.01	Belanja Barang	43.234.452.169
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.234.452.169
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	69.530.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.108.442.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.433.719.325
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	270.192.100
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	246.721.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.100.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	150.725.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	131.650.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.171.915.864
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	304.843.500
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	295.030.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	36.625.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	208.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.647.497.692
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.956.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.741.074.150
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	133.120.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	10.900.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.720.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.921.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.794.960.548
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	720.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.600.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	23.250.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	830.546.190
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	244.316.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.568.523.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.069.969.200
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	153.500.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	78.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.260.714.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	634.204.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26.780.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	192.100.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	194.900.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	10.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.399.650.200
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	265.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	443.170.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	135.000.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	5.765.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	5.500.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	29.550.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	158.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	102.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	276.050.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	191.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	83.107.597.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64.678.054.344
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	69.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.877.415.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.393.540.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	65.300.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.497.848.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.100.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	715.590.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.068.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.727.300.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.264.530.250
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	349.400.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.333.400.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	777.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	215.600.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.376.650.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	130.450.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	426.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.479.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.744.060.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.375.245.774
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.852.340.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	607.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	590.870.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	250.100.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	878.500.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	23.400.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	752.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	64.870.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	278.800.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	87.688.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	187.852.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.739.396.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	720.082.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.540.502.320
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	44.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	527.800.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	47.050.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.579.775.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	11.428.654.136
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.754.332.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	975.676.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	547.403.832
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.237.936
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	76.003.568
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	239.748.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	39.223.000
5.1.02.02.03.0016	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya	200.000.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	525.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.292.970.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	257.800.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.500.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	37.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	18.000.000
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	15.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	479.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.800.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	61.600.000
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	4.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	807.770.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	220.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	304.500.000
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	60.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.007.130.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	539.120.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	70.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	451.250.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	186.400.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	467.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	54.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.220.860.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	18.500.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	120.000.000
5.1.02.02.06.0002	Belanja Sewa Jalan Provinsi	120.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	704.527.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	346.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	134.527.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	94.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	30.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	120.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	492.514.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	139.100.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	353.414.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	24.000.000
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	24.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.477.078.460
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.304.291.100
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	35.000.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	60.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	35.000.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	0
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	71.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	802.580.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.091.850.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	165.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	425.895.800
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	77.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	3.000.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	67.500.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	52.291.300
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	5.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	3.600.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	216.288.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	100.400.000
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	550.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	310.530.000
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	8.100.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	24.000.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.000.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	4.800.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	41.466.000
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	40.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	188.170.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	16.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.500.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	40.000.000



Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	163.630.000
5.1.02.03.02.0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	6.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	237.640.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.187.472.400
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.193.835.400
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	13.000.000
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7.637.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	700.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	258.000.000
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.964.314.960
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	762.664.960
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	50.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	748.750.000
5.1.02.03.04.0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	3.500.000
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	2.900.000
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	10.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	16.500.000
5.1.02.03.04.0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	370.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	5.000.000
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	17.405.369.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.155.369.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.370.715.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	692.340.570
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.092.313.430
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	250.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.256.323.965
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.453.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	525.950.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	683.800.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	504.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.740.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.802.573.965
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.730.663.965
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.071.910.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.957.903.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.957.903.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.957.903.000
5.1.05	Belanja Hibah	4.382.478.329
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.297.700.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.943.700.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.943.700.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	354.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	354.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.778.329
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.778.329
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.778.329
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.087.520.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.577.520.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.577.520.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.577.520.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	510.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	510.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	510.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>88.620.748.060</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.000.000.000
5.2.01.01.02.0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	3.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.283.572.853
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	759.620.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	700.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	700.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	59.620.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	55.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.620.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.607.160.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.605.000.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.955.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	650.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.160.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.160.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	1.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	204.000.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	200.000.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	200.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.600.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.600.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	5.600.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.124.874.420
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.280.038.920
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.280.038.920
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	728.335.500
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	217.100.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	163.285.500
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	337.450.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	116.500.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	27.500.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	66.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	23.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.597.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	6.597.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	597.500
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	6.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.461.980.500
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	33.724.500
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	33.724.500
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.428.256.000
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	70.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.358.256.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	884.709.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	13.285.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	13.285.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	201.424.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	201.424.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	670.000.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	50.000.000
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	595.000.000
5.2.02.08.07.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	15.000.000
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	10.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.031.665.233
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	288.378.350
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	55.937.350
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	120.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	112.441.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	743.286.883
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.200.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	735.086.883
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	109.168.200
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	109.168.200
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	109.168.200
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	101.760.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	101.760.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	101.760.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	212.400.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	212.400.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	185.000.000
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	27.400.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	75.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	75.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	75.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	269.838.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	269.838.000
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	4.838.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	265.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	429.200.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	429.200.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	429.200.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.766.335.117
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.966.335.117
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.416.335.117
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.820.635.117
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.800.000.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.750.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	605.700.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.400.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	700.000.000
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	2.180.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.700.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.030.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.280.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.550.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	5.550.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	800.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	800.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	800.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.222.793.090
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.209.565.226
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	37.065.665.226

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	35.321.212.117
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.744.453.109
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	143.900.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	143.900.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.083.251.864
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.583.251.864
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	200.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.383.251.864
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	200.000.000
5.2.04.02.02.0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	200.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	300.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	300.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	195.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	195.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	195.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.734.976.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.305.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.305.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	429.976.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	429.976.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	348.047.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	4.000.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.300.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.300.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	300.000
5.2.05.08.01.0003	Belanja Modal Hak Cipta	1.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	342.747.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	342.747.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	342.747.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>86.870.859.359</b>

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman  
 Nomor : 86 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Desember 2021

**KOTA PARIAMAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.138.442.830
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.099.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.099.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.099.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.039.442.830
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.039.442.830
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.039.442.830
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	83.732.416.529
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	4.646.528.329
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	4.646.528.329
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	4.646.528.329
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	79.085.888.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.542.612.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.542.612.200
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.543.276.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.543.276.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>646.934.202.345</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(30.000.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	30.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.000.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	30.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.000.000.000</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>30.000.000.000</b>

Walikota Pariaman



GENIUS UMAR